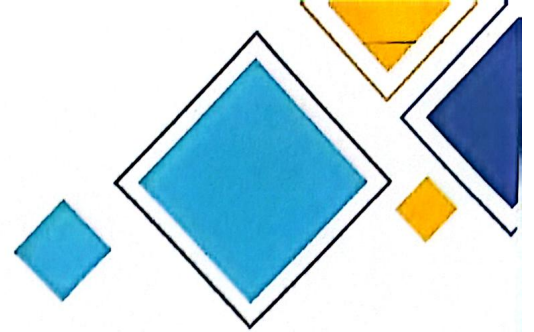




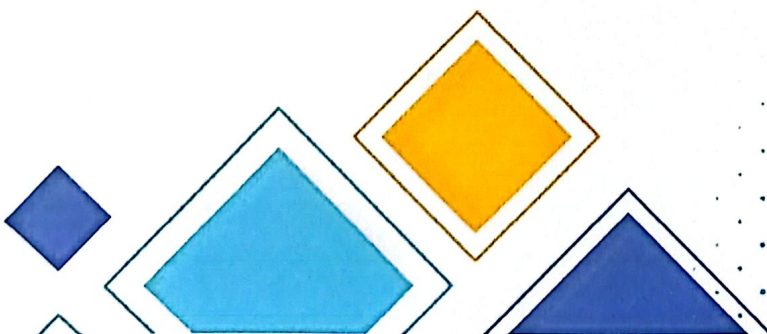
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**



INDIKATOR KINERJA UTAMA 2026

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

KAB. KUTAI KARTANGERA



DATA CAPAIAN INDIKATOR KINRJA UTAMA 2026 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

TUGAS : MEMPUNYAI TUGAS POKOK MEMBANTU BUPATI MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH DAN TUGAS PEMBANTUAN DI BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

FUNGSI :

1. PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2. PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3. PELAKSANAAN EVALUASI DI BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4. PELAKSANAAN ADMINISTRASI DINASI DI BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5. PELAKSANAAN FUNGSI LAEN YANG DI BERIKAN OLEH BUPATI

NO	NAMA SASARAN	IKU	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	TARGET	KETERANGAN
1	MENINGKATKAN KUALITAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM AKTIVITAS PEMBANGUNAN	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indikator statistik yang digunakan untuk mengukur ketimpangan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan berbasis gender dilihat dari tiga dimensi capaian dasar manusia yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPG adalah rasio (perbandingan) antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan IPM laki-laki.	IPM Perempuan DIBAGI IPM Laki-laki DIKALI 100 PERSEN	82,10 INDEKS	Badan Pusat Statistik
2		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indikator yang menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak. IPA disusun berdasarkan 5 klaster hak anak, yaitu: hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan perlindungan khusus	IPA merupakan hasil rata-rata tertimbang dari Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	62,90 INDEKS	Kemen PPPA menyusun dan menyediakan data IPA, Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS)

Tenggarong, 06 Februari 2026
 Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Kabupaten Kutai Kartanegara

